

Teori Pembagian Kekuasaan Menurut Trias Politika John

Politics in Indonesia, Islamic viewpoint; collection of articles and papers.

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa memiliki kesejarahannya sendiri. Sejak perumusan di BPUPKI hingga masa paska Reformasi, telah muncul berbagai tafsir dan penjabaran strategis atas nilai-nilai Pancasila. Pada masanya, tafsir Pancasila pernah terseret dalam pertentangan ideologis yang nyaris memecah belah bangsa, sebagaimana terjadi pada masa Konstituante hingga tragedi bangsa di tahun 1946/ Belajar dari konflik ideologi di masa sebelumnya, rezim Orde Baru kemudian mengedepankan pembangunan ekonomi dengan menekan secara kuat konflik-konflik ideologis dengan menggunakan jargon Pancasila dala sebagai azas tunggal. Lepas dari represi ideologis dengan tafsir tunggalnya, bangsa Indonesia masuk dalam euforia kebebasan, yang juga berimbas pada terpinggirkannya Pancasila dalam wacana kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan sampai pada detik ini kemerdekaan yang kita peroleh masih bersifat "semu". Secara prinsipal, bangsa ini masih terjajah dalam semua bidang baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.

Best Practice dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik banyak dilakukan pada negara-negara maju agar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Best practice ini dapat menjadi landasan agar dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi perlu adanya penelitian yang mendalam sehingga dapat dijabarkan dengan baik apakah resiko dan konsekuensi yang dapat diambil bila kita mengadopsi best practice tersebut dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian teman-teman ini akan menjawab kegelisahan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahun pertama), best practice dan komparasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan (tahun kedua) dan Konsekuensi adopsi best practice dalam system pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (tahun ketiga).

TOP NO 1 Ulangan Harian SMP/MTs Kelas 8 (Gratis buku Cinta Pahlawan Nasional Indonesia)

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

BUKU AJAR HUKUM TATA NEGARA

Volume 1 Nomor 1, September 2019

Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisapendidikan-pancasila-dan-kwn-smama-kelas-x#.YXIYNFVBxhE Seri buku PASTI B merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan a semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai K (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui conto Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan a semester.

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan : bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembah penerbit PrenadaMedia

Buku ini berjudul "HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI ASEAN". Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui hukum perjanjian internasional yang ada di ASEAN.

Buku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritis hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin mendalami hukum konstitusi. Muatan materi buku ini menguraikan tentang pilar-pilar Konvensi Ketatanegaraan yang te melalui kebiasaan ketatanegaraan (custom) dan kesepakatan ketatanegaraan (agreement) sebagai bentuk yang dapat digunakan dalam rangka penguatan fungsi DPD. Arah pengguna Ketatanegaraan yang bersifat custom untuk menguatkan fungsi DPD RI seperti dalam hal pengawasan, DPD yang dapat memanggil pihak pemerintah dan langsung memberikan rekor rekomendasi pada saat tersebut. Konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan ketatanegaraan (agreement) pada prinsipnya dapat digunakan sebagai penguatan fungsi DPD R Civic Education

Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial

Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X

Perkembangan kekuasaan pemerintahan negara

Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan

Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pemerintah merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau yang disebut organisasi. Kita pun hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki bentuk organisasi masyarakat yang terkait dengan pemerintahan. Pemerintahan merupakan hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang negara dan aparat yang menjalankannya disebut pemerintah. Ilmu pemerintahan yang kita bahas saat ini, bisa dikategorikan ilmu yang masih baru, atau meminjam pendapat Soewargono, ilmu pemerintahan masih sering dipandang sebagai ilmu yang kurang jelas sosoknya.

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government yang berasal dari bahasa Latin Governare, Greek kybernan yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Untuk menjangkau Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait keseluruhan tahap dan informasi hasil tes kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online dan tidak dipungut biaya. Sistem Seleksi dilakukan dengan sistem gugur pertahapan tes. Materi seleksi penerimaan calon Praja IPDN terdiri dari Seleksi Administrasi dan Materi Tes. Materi Tes terdiri dari: Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); Tes Kesehatan oleh Pusat Kesehatan TNI; Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat; dan Tes Pantukhir oleh Tim Seleksi. Materi dan Penilaian TKD meliputi: a. Jumlah soal 100 dengan waktu tes 90 menit b. Cara penilaian, dengan Persentase: -Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) : $40\% \times 175 = 70$ -Tes Intelegensi Umum (TIU) : $50\% \times 150 = 75$ -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : $72\% \times 175 = 126$ c. Setiap soal (TWK dan TIU) yang jawabannya benar mendapat nilai 5 dan salah mendapat nilai 0 d. Setiap soal TKP tidak ada jawaban benar ataupun salah, nilai terkecil mendapat nilai 1 dan nilai terbesar mendapat nilai 5 (Skala 1-2-3-4-5) e. Total nilai tertinggi (TWK, TIU dan TKP) adalah 500 (semua jawaban benar) dan nilai terendah 35. f. Untuk lolos, setiap peserta harus memenuhi Nilai Ambang Batas TKD Buku ini sangat lengkap. Isinya merupakan gabungan dari buku TOP SUKSES Tes Masuk IPDN dan Diktat Terlengkap CPNS. Sangat tepat untuk bahan persiapan menghadapi SPCP IPDN JUDUL: BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN PENULIS: TIM LITBANG PSIKOLOGI SALEMBA ISBN:978-602-5454-11-0 PENERBIT: FORUM EDUKASI HALAMAN: 848 UKURAN: 19 X 26 TANGGAL TERBIT: JANUARI 2018 BukuEdukasi.Com BuEd.Com

Buku ini ditulis dan berisi materi materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diharapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara dengan lebih efektif dan efisien.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD Tahun 1945). Di dalam Kekuasaan Kehakiman terdapat jabatan Hakim sebagai unsur pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Jabatan Hakim saat ini mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya. Buku ini mengupas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengulasan dalam berbagai sub-tansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah secara jelas diatur dalam UUD Tahun 1945. Pengaturan jabatan hakim saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat oleh seorang hakim. Hakim saat ini masih berdiri di antara 2 (dua) kaki atau dapat dikatakan ada sebuah dualisme pengaturan terkait dengan profesi hakim. Hal ini kemudian yang menyebabkan seorang hakim sulit untuk melakukan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan kemandirian hakim. Penyebutan hakim sebagai pejabat negara tidak sesuai implementasinya baik itu dari sisi kesejahteraan maupun kepada sistem protokoler yang didapatkan seorang hakim. Hak dan kewajiban yang diperoleh seorang hakim pun menjadi sama dengan pegawai ASN karena masih adanya status hakim yang berada pada grey area. Selain itu, buku ini juga mengupas bagaimana seorang hakim diperlakukan tidak layak dari sisi keamanan sampai kelayakan rumah dinas dan bagaimana pembinaan dan konsep pendidikan serta pelatihan hakim yang terbatas anggarannya. Pada gilirannya, buku ini mengupas pula bagaimana pengawasan kepada seorang hakim yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu MA dan KY. Buku ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran secara utuh kepada para pembaca terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Diharapkan para pembaca mengerti dan memahami kondisi hakim baik dilihat dari sisi struktur organisasi, perekonomian, manajemen, pendidikan, sampai dengan pengawasan. Yang terakhir, buku ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengatur sebuah jabatan hakim dalam peraturan perundang-undangan.

Antara Pengaturan dan Implementasinya

Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan

Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

dimensi pendekatan politik hukum terhadap kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945

Kejaksaan RI

BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN

Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis sistem dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor

seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Kegiatan politik bukan kegiatan individu semata, melainkan aktivitas yang melibatkan banyak individu berinteraksi di dalamnya. Buku ini terdiri atas 20 bab meliputi Definisi Ilmu Politik, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik, Teori-Teori Politik, Memahami Negara, Demokrasi, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, Pemilihan Umum, Sistem Politik, Komunikasi Politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Damping untuk memenuhi kebutuhan para pemerhati hukum, masyarakat umum yang menaruh perhatian pada hukum dan negara hukum berdasarkan Pancasila, demikian pula mahasiswa baik strata satu, strata dua dan bahkan pula strata tiga akan bahan bacaan tentang kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila, buku ini juga dapat digunakan aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakkan hukum, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus persengketaan hukum dan khususnya perkara-perkara pidana.

Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/explore-pendidikan-kewarganegaraan-smama-kelas-x-wajib#.YXDdG1VByUk
Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver). Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang "Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X".

Buku ini hadir dengan menawarkan gagasan revitalisasi atas Pancasila di era demokrasi sekarang ini. Sebagai simpul bersama bangsa Indonesia Pancasila harus disegarkan kembali makna dan tafsirnya, dan yang lebih penting lagi ia tidak dibenturkan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi pilihan Indonesia di era Reformasi. Demokrasi sejatinya dapat berjalan secara sinergis dengan nilai dan pandangan Pancasila, sepanjang demokrasi dipraktikkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Lebih dari itu, demokrasi Indonesia tidak terbatas memuaskan secara prosedural, namun harus diorientasikan untuk menjaga empat konsensus kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Karya yang layak dibaca siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi dan karakter diri Indonesia. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana- Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an

Kewarganegaraan

Pengantar Politik

Pend. Kewarganeg SMP/MTs Kls VIII

Hukum Kebijakan Publik

Hukum Administrasi Negara

SIGN Jurnal Hukum adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Menggunakan sistem peer-review untuk publikasi artikel. SIGN Jurnal Hukum menerima artikel penelitian baik studi empiris maupun studi doktrinal dan relevan dengan bidang Hukum, dengan syarat belum pernah dipublikasikan sebelumnya di tempat lain.

Role and position of public prosecution according to Indonesian law.

Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk TOP NO 1 Ulangan Harian SMP/MTs Kelas 8 yaitu Ulangan harian adalah kegiatan evaluasi secara periodik sesuai dengan kompetensi dasar (KD). Nilai ulangan harian sangat berpengaruh terhadap nilai akhir (nilai rapor). Kebanyakan siswa gagal meraih nilai terbaik dalam ulangan harian karena mereka kurang berlatih mengerjakan soal-soal tersebut dan mereka tidak mempunyai buku pegangan yang mengacu pada soal-soal ulangan tersebut. Untuk itu, buku ini disusun dan dikembangkan untuk meningkatkan prestasi siswa dalam meraih nilai ulangan yang sempurna.. Sedangkan untuk Cinta Pahlawan Nasional Indonesia berisikan pahlawan - pahlawan nasional lengkap. #BintangWahyuGratis1 -Bintang Wahyu-

Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., merupakan salah seorang Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam matakuliah Filsafat Hukum maupun Metode dan Teknik Perancangan Perundang-undangan (MTPU). Meskipun Prof. Frans 10 tahun yang lalu telah menikmati suasana purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun sebagai akademisi, rasanya beliau tidak pernah merasa pensiun. Terbukti hingga saat ini, beliau masih tetap menjalani dan menikmati profesinya sebagai akademisi. Tulisan yang berhasil dihimpun dalam buku ini merupakan kontribusi para kolega dosen, para praktisi/profesi, maupun para sahabat beliau. Mereka para alumnus Program S-1, S-2, maupun S-3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maupun yang berasal dari kampus lain. Judul berbagai tulisan dalam buku ini sangat beragam sesuai dengan latar belakang keahlian dan perspektif masing-masing kontributor naskah. Hal itu tidak menjadi soal, justru menggambarkan keberagaman pemikiran yang sejatinya saling melengkapi satu sama lain. Keberagaman

tersebut sejalan dengan karakter pemikiran Prof. Frans sebagai seorang akademisi, yang selalu terbuka dan toleran terhadap keberagaman pemikiran dan pandangan tentang hukum

Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana

fiqih demokratik kaum santri

Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI ASEAN

Dasar-Dasar Ilmu Politik

posisi dan fungsinya dari perspektif hukum

Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Penulis sebagai Advokat yang menjalankan praktik hukum di lembaga peradilan Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo dan beberapa lembaga peradilan lainnya sejak tahun 1995 yang dipadukan dengan teori hukum selaku akademisi mulai tahun 1994 dalam rangka mencari dan menemukan keadilan dan putusan hakim. Dengan memadukan beberapa teori hukum sebagai Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory baru dapat ditemukan dalam memperoleh keadilan melalui putusan hakim. Keadilan lahir dari pertimbangan hukum suatu putusan dengan mengedepankan nilai-nilai yang sarat terhadap kepatuhan terhadap moral dan etika. Pentingnya Penulisan buku ini sebab dalam praktiknya, acapkali ditemukan kesalahan hakim dalam menegakkan keadilan masyarakat sehingga menciderai keadilan itu sendiri. Dan tentunya, kesalahan-kesalahan ini tidak hanya berimplikasi terhadap lembaga peradilan, tetapi menjadi gunung es yang menciptakan stigmasasi Distrust (ketidakpercayaan) publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Buku ini eksplisit diurai dalam 6 (Enam) Bab; Yakni, Bab 1 Keadilan Dalam Perspektif; Bab 2 Penyempurnaan Profil Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman; Bab 3 Profesionalitas Hakim Dalam Penerapan Hukum; Bab 4 Akibat Hukum Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Putusan; Bab 5 Kasus Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Putusan Dan Pelanggaran Kode Etik Hakim; dan Bab 6 Budaya Hukum Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Putusan. Dalam proses penulisan buku ini, terdapat hal menarik yang menjadi penguatan literatur, yakni terdapat 10 kasus khusus yang mengurai kasus-kasus yang disadur langsung dari pengalaman Penulis sebagai advokat yang menjalankan praktik hukum lebih dari 20 tahun.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia secara teoretis dan normatif adalah independen, merdeka, dari segala pengaruh-pengaruh yang dapat merintangai keberfungsian dalam proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, maka sangat urgen diketahui agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru. Disusun secara sistematis dari pokok pangkal pada dasar, yakni Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, lalu memasuki wilayah Hukum Administrasi Negara. Susunan ini sengaja digunakan untuk melihat Hukum Administrasi Negara secara lengkap dan sempurna, yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.

Political and legal aspects of executive power of the Indonesian president, with reference to the 1945 Constitution.

SERI SUPER IPS : - Jilid 6

Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

SIGn Jurnal Hukum

Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Peraturan Delegasi di Indonesia

Kesejahteraan dan keadilan merupakan cita-cita bersama seluruh elemen yang berada dalam institusi yang disebut negara. Oleh karena kehadiran negara yang merupakan hasil dari kesepakatan antar masyarakat, sudah semestinya dapat menciptakan perlindungan bagi warganya. Negara harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, melalui instrumen kebijakan publik. Berbagai kajian tentang hukum maupun kebijakan publik di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari kontekstualisasi makna negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD RI 1945. Artinya, secara maknawi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan yang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Buku ini awalnya merupakan buku pegangan untuk mahasiswa Fakultas Hukum pada mata Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Namun seiring permintaan yang banyak dari selain mahasiswa, sehingga penulis mencoba membuat desain buku agar bisa dipahami oleh kalangan praktisi baik dari unsur pemerintah maupun organisasi Non Government. Semoga dengan hadirnya buku ini akan memberikan referensi tambahan mengenai materi hukum dan kebijakan publik, yang sebenarnya sudah cukup banyak yang beredar.

Teori pembagian kekuasaan yang diuraikan dalam buku ini adalah ajaran trias politika dari Montesquieu dan John Locke, maupun Teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh van Vollen Hoven. Dalam buku ini juga menguraikan secara singkat tentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif perbandingan yakni kekuasaan kehakiman di Belanda sebagai representasi dari negara-negara yang menganut konsep rechtsstaat dengan civil law system dan Amerika, sebagai negara penganut konsep the rule of law dengan common law system.

Buku ini membahas salah satu persoalan yang amat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang hingga kini tetap aktual dan tetap menarik perhatian banyak sarjana hukum terkemuka di berbagai bagian dunia. Masalah tersebut ialah masalah pendelegasian wewenang perundang-undangan (the problem of delegation of legislative power). Peraturan delegasi (delegated legislation), dewasa ini memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Meskipun demikian, legitimasi demokratis peraturan delegasi masih menjadi perdebatan yang menarik hingga kini. Mengapa masalah ini menarik? Satu pendapat menyatakan, karena masalah tersebut menyangkut hubungan alat (organ) legislatif dengan alat eksekutif dalam kerangka ajaran pemisahan kekuasaan (trias politica) yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai urat nadi pemerintahan demokratis dibawah faham "the rule of law". Pendelegasian wewenang perundang-undangan yang menimbulkan masalah politis konstitusional. Peraturan delegasi dewasa ini memegang peran yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Fenomena "delegated legislations" sebagai peraturan pelaksana undang-undang atau "subordinate legislations" ini, diakui sangat penting di semua negara. Hampir tak ada negara yang tak membutuhkannya untuk menggerakkan pemerintahan. Peraturan delegasi merupakan keniscayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aturan yang lebih tinggi. Tanpa peraturan delegasi, bisa dipastikan pemerintahan akan berjalan lambat bahkan mandeg.

Tujuan dari diterbitkannya buku ini, untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Teori yang dijabarkan dalam buku ini meliputi: (1) Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, (2) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD, (3) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, (4) Norma, Hukum dan Peraturan, (5) Hak Asasi Manusia, (6) Kebutuhan Warga Negara, (7) Konstitusi Negara, (8) Kekuasaan dan Politik, (9) Karakter Peserta Didik Pancasila, (10) Globalisasi. Dengan mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mampu mengimplikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Pola penyajian buku ini penulis upayakan sistematis, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta Pdt. Henriko Sihotang, M.Th atas cinta dan kasih sayang yang membuat penulis dapat menyelesaikan buku ini, dan pada pihak-pihak yang telah membantu. Kami menyadari bahwa buku yang berisi Konsep Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini masih jauh dari sempurna. Dalam banyak hal sudah tentu buku ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Khususnya dalam substansi isi, materi yang disajikan. Karena itu demi kesempurnaan buku ini, kedepan kami sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Akhir kata semoga penulisan buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan penunjang materi kuliah bagi mahasiswa, maupun sebagai pengembangan pengetahuan bagi para pembaca.

HUKUM TATA NEGARA

Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila

TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya

The Spirit of Laws

Prosiding Kongres Pancasila V 2013

Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya mendudukan Komisi Yudisial bertugas sebagai "polisi", bertindak sebagai "jaksa", dan atau berfungsi sebagai "hakim" dalam penegakan etik. Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata. Namun demikian, tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian dalam persidangan hukum. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim. Tergambar dengan jelas bahwa proses pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik berbeda dengan pembuktian hukum. Buku ini penting sebagai panduan bagi para pencari keadilan, advokat, atau kelompok masyarakat dalam proses pendampingan advokasi hukum di Pengadilan. Penting pula bagi akademisi, mahasiswa atau peminat hukum lain untuk membaca buku ini untuk memahami Komisi Yudisial secara lebih dekat dan praktis.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok buku ini, meliputi: 1. Pengantar Pemerintahan Daerah. 2. Pembentukan Daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan. 3. Pembagian Urusan Pemerintahan. 4. Penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Sistem Pemilihan Kepala dan wakil Kepala Daerah. 6. Kedudukan, tugas, Tugas dan wewenang DPRD. 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 8. Kepegawaian Daerah, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Sipil Daerah/Kab/Kota. 9. Prinsip Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah. 10. Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Pembentukan Kawasan Perkotaan. 12. Pemerintahan Desa. 13. Kerja Sama Daerah dan Perselisihan. 14. Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Buku ini layak dijadikan referensi bagi pejabat negara, politisi partai, anggota dewan, akademisi, mahasiswa, dan semua warga

negara. Tujuan dihadapkannya buku ini guna mematangkan wawasan kita dalam memahami Pemerintahan Daerah baik secara teori, hukum, dan Aplikasinya. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (*staatrecht*) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu *staatrecht in ruimere zin* (arti luas), dan *staatrecht in engere zin* (arti sempit), dimana dalam arti *in engere zin* inilah Hukum Tata Negara atau *verfassungrecht* yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah *law constitutional* yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah *lehre* dan *recht* pada istilah *verfassung* yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.

Pendidikan Kewarganegaraan

Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis

Hukum Tata Negara Indonesia

Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat

Islam kebangsaan